



yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia, pada pasal 1 ayat 7 berbunyi : tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan²

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus sekolah. Sedangkan otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan warga sekolah yang didukung kemampuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.³

Didalam kebijakan pendidikan Nasional yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pendidikan (educational performance) Indonesia adalah kurang diperhitungkannya lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional. Sekilas ketika kita berbicara masalah peningkatan mutu pendidikan seolah-olah semuanya ditentukan oleh sekolah. Lembaga pendidikan Islam, misalnya madrasah, maupun sekolah Islam lainnya masih dipandang sebelah mata dan kurang diperhitungkan.

Tidaklah mengherankan bila muncul anggapan di masyarakat bahwa pendidikan Islam selalu diasosiasikan dengan lembaga pendidikan terbelakang, kurang bermutu serta tidak menghasilkan lulusan (educational output) yang

² Made Pidarta, *Landasan Pendidikan*, (Jakarta: rineka cipta, 1997), h 44

³Budi Raharjo, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Departemen Pendidikan Nasional Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, (Jakarta:2003), hlm. 8

memadai dan tidak memiliki kemampuan komprehensif-kompetitif terutama dalam bidang ilmu pengetahuan.⁴

Secara sederhana bisa kita lihat dari rendahnya minat para orang tua untuk menyerahkan masa depan pendidikan anak-anaknya ke madrasah atau sekolah islam lainnya (notabane Islam). Biasanya mereka tidak menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai alternatif utama untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kalaupun akhirnya mereka masuk bersekolah di madrasah, ataupun sekolah Islam biasanya itu dilakukan karena terpaksa (karena tidak lulus di sekolah umum, misalnya). Hal itu disebabkan tidak lain karena, perhatian pemerintah yang dicurahkan pada lembaga pendidikan Islam sangatlah kecil porsinya, padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang *sosialistis religius*.⁵

Dari sinilah timbul pertanyaan, bagaimanakah kemampuan lembaga pendidikan Islam di Indonesia untuk merencanakan, menata, mengatasi, dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi menuju pendidikan bermutu dan unggul Padahal secara tidak langsung lembaga pendidikan islam telah menganut dan menerapkan program MBS (manajemen berbasis sekolah) dimana sebelum adanya penerapan MBS, pelaksanaan pendidikan itu diatur oleh pemerintah pusat,

⁴ Fahrurrozi, From: <http://www.msi-iii.net>. Akses:, 21/03/2012, jam 21.27.

⁵ Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan Fakta [Suatu Pengantar]*,(Tiara Wacana: Yogyakarta, 1991) hal.11

maka sesudah penerapan MBS pelaksanaan pendidikan berpusat pada sumber daya yang ada di sekolah itu sendiri.⁶

Dengan demikian, proses belajar mengajarnya pun seharusnya berjalan dengan baik (efektif). Maksudnya adalah pembelajarannya dijalankan sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Proses belajar mengajar yang efektif merupakan proses belajar mengajar yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik. Proses belajar mengajar bukan sekedar penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan akan tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik⁷. Hal tersebut sudah diterapkan dalam lembaga pendidikan islam dengan program MBS-nya akan tetapi masih tidak sesuai dengan harapan dimana para masyarakat masih banyak yang memandang sebelah mata.

Maka untuk mengatasi problem-probleman tersebut diatas (Problematika penerapan MBS) Langkah awal yang harus diperhatikan adalah melakukan penataan terhadap lembaga pendidikan Islam, dengan cara menganalisis dari aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman.

1. kekuatan (*strengt*)Pendidikan Islam (madrasah, sekolah yang bercirikan Islam, dan perguruan tinggi) lebih besar 80 % dikelola oleh swasta. Dalam

⁶ Nur Kholis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. 1

⁷ Budi Raharjo, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, (Jakarta: , 2003), hlm 10.

Tindakan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan Islam masih tetap sama, diskriminatif. Sikap inilah yang menyebabkan lembaga pendidikan Islam sampai detik ini terpinggirkan. Terpinggirnya pendidikan Islam dari persaingan sesungguhnya dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, *pertama*, meliputi manajemen lembaga pendidikan Islam yang pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Hal ini tercermin dari kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang umumnya dikelola secara modern. *Kedua*, faktor kompensasi profesional guru yang masih sangat rendah. Para guru yang merupakan unsur terpenting dalam kegiatan belajar mengajar, umumnya lemah dalam penguasaan materi bidang studi, terutama menyangkut bidang studi umum, ketrampilan mengajar, manajemen kelas, dan motivasi mengajar. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan Islam kurang kondusif bagi pengembangan kompetensi profesional guru. *Ketiga*, adalah faktor kepemimpinan, artinya tidak sedikit kepala-kepala madrasah yang tidak memiliki visi, dan misi untuk mau ke mana pendidikan akan dibawa dan dikembangkan.

Kepala madrasah seharusnya merupakan simbol keunggulan dalam kepemimpinan, moral, intelektual dan profesional dalam lingkungan lembaga pendidikan formal, ternyata sulit ditemukan di lapangan pendidikan Islam. Pimpinan di lembaga pendidikan Islam bukan hanya sering kurang memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi internal dengan para guru, melainkan

Beberapa indikator yang menunjukkan kesenjangan ini yaitu mulai dari tingkat ketersediaan tenaga guru, status guru, kondisi ruang belajar, tingkat pembiayaan (*unit costpr*) siswa, hingga tidak adanya standarisasi mutu pendidikan Islam, karena pendidikan Islam tidak berada di bawah Depdiknas.¹¹ dan lebih tragis lagi adalah sikap diskriminatif terhadap prodak atau lulusan pendidikan Islam. Faktor ketiga, adalah adanya diskriminasi masyarakat terhadap pendidikan Islam. Secara jujur harus diakui, bahwa masyarakat selama ini cenderung acuh terhadap proses pendidikan di madrasah atau sekolah-sekolah Islam. Rata-rata memandang pendidikan Islam adalah pendidikan nomor dua dan biasanya bila menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Islam merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di lembaga pendidikan di lingkungan Diknas.¹²

Diakui perkembangan pendidikan Islam pada akhir-akhir ini secara berangsur-angsur mulai terasa kemajuannya, hal ini terbukti dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan beberapa model pendidikan yang ditawarkan, yang menunjukkan harapan untuk mampu bersaing. Tetapi masih banyak yang memerlukan penataan. Maka manajemen sekolah perlu ditingkatkan, pendidikan Islam hendaknya berupaya maksimal untuk membenahi dan melakukan penataan kembali terhadap masalah internalnya, seperti persoalan

¹¹ Abdul Aziz, Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum Departemen Agama], *Perlu Peraturan Pemerintah tentang Desentralisasi Madrasah*, Kompas, Jakarta, From: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/26/DIKBUD/808.htm>, acces, 25 Maret 2012, jam 15.30

¹²M. Dahrman, *Berlaku Adil terhadap Madrasah*, From: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0211/12/kha1.htm>, acces, 25 Maret 2012, jam 15.30

profesionalisme guru, kurangnya kompetensi guru, kurangnya kreatifitas guru, dan guru mendapat tugas lain selain mengajar dan mendidik, Yayasan yang masih belum memberikan kewenangan sepenuhnya, dan masyarakat sulit terlibat dalam kegiatan sekolah. Disamping itu terdapat kecenderungan dan gejala rendahnya kinerja yang ditunjukkan dari pelaksana tugas yang tidak maksimal, seperti kurang disiplin dalam mengajar, fungsi pokok pendidik belum terlaksana secara maksimal, orientasi tugas mendidik belum tersentuh dengan baik, jadi sumberdaya manusia (SDM) di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar ini masih belum kurang baik maka akan membutuhkan penanganan dan pelatihan yang lebih aktif untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berbagai usaha untuk ditempuh dalam meningkatkan manajemen dan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualitas guru, serta perbaikan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan profesional guru serta manajemen pendidikan sekolah.

Para pelaku pendidikan cenderung memilih cara lama yang dirasa telah menjadi rutinitas dari pada melakukan perubahan dan inovasi dari kebijakan yang baru. Keadaan ini tentunya dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan manajemen pendidikan. Kecenderungan lain yang terjadi di beberapa tempat pendidikan dimulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah keatas tidak lepas dari beberapa persoalan. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya; para pendidik dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik tidak berbekal pada persiapan perangkat mengajar.

Dalam hal ini kepala sekolah, pendidik, tata usaha sebagai pelaku praktis pendidikan dan pengajaran di sekolah Asumsi positif yang dapat ditawarkan untuk menghadapi permasalahan tersebut antara lain melalui usaha pengelolaan manajemen pendidikan secara profesional. perlu dikaji melalui kegiatan penelitian, Dalam hal ini pendidikan memberi wewenang penuh kepada sekolah dan pendidik dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi. Pendidik lebih sekedar melaksanakan tugas-tugas kepada para peserta didik dalam mengisi waktu tatap muka di kelas padahal mendidik tidak hanya dikelas tetapi dimana pendidik itu berada.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul; *Problematika Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar Poteran Talango Sumenep.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mempermudah dalam memahami permasalahan, penulis membuat rangkaian dan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Problematika Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar Poteran Talango-Sumenep?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar Poteran Talango-Sumenep?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan maka tujuan penulis mengadakan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui problematika Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar Poteran Talango-Sumenep?
2. Untuk Mengetahui faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar Poteran Talango-Sumenep

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Secara garis besar ada dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 1. Dapat Mengetahui Problematika Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar Poteran Talango-Sumenep
 2. Dapat Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar Poteran Talango-Sumenep
 3. Digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana S1 dalam bidang Kependidikan Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Guru

Sebagai bahan masukan, untuk lebih mengoptimalkan proses pembelajaran dengan peningkatan profesionalismenya sebagai guru, untuk mencapai Manajemen yang bermutu.

2) Bagi siswa

Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk lebih termotivasi untuk meningkatkan belajarnya sehingga tujuan Madrasah Ibtidaiyah dapat tercapai.

3) Bagi peneliti lain

Memberi masukan pada Peneliti lain, sebagai acuan untuk mengadakan penelitian yang juga berkaitan dengan problematika penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar

E. Definisi Operasional

Ruang lingkup dalam penelitian Problematika Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar Desa Poteran Kecamatan Talango meliputi:

1. Problematika

Problematika adalah 1) suatu hal yang menimbulkan masalah 2) suatu hal yang masih belum di pecahkan¹⁴

Adapun yang di maksud adalah permasalahan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di Madarasah Ibtidaiyah Syariful Anwar Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

2. Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerpan dalam kamus bahasa Indonesia, 2002 427. Implementasi adalah bermuara pada pengertian pada suatu aktivitas yaitu adanya reaksi atau mekanisme suatu system, implementasi bukan suatu aktifitas akan tetapi suatu kegiatan yang terencana yang di lakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan

3. MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, sekolah. Manajemen berasal dari bahasa Inggris "to manage" yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan manajemen sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas

¹⁴ Kamus besar bahasa indonesia /tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi pesertadidik¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas pada intinya Manajemen Berbasis Sekolah adalah pengorganisasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri dan leluasa yang dipimpin oleh kepala sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk membuat kebijakan dalam rangka mencapai tujuan sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (masyarakat) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

4. Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar

Madrasah Ibtidaiyah adalah sebuah lembaga yang terletak ditenga masyarakat yang memberikan dasar-dasar dalam pembinaan minat keagamaan dengan tujuan dan fungsi serta aktivitas membina siswa utnuk membentuk keagamaan baik berupa amalan-amalan keagamaan dan kemudian di jadikan sikap dalam bentuk perilaku sehari-hari guna membentuk mental keagamaan bagi siswa.

¹⁵ Nurdin matry, implementasi dasar-dassar manajemen sekolah dalam era otonomi daerah, (makassar: aksara madani), 2009. hlm. 38

Yang dimaksud problematika penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Ibtidaiyah atau Lembaga Pendidikan Islam adalah : Merupakan suatu wadah lembaga yang menghantarkan seseorang kedalam alur berfikir yang teratur dan sistematis. Dalam pengertiannya pendidikan adalah “usaha sadar dan direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan, masyarakat bangsa dan negara”. Dalam pelaksanaannya sebuah lembaga pendidikan kerap-kali dihadapkan pada problem-problem sekolah mulai dari manajemen guru, pembelajaran, penyiapan sarana dan prasarana, materi, tujuan bahkan sampai pada penyiapan proses. Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang peneliti maksud adalah bagaimana penerapan manajemen berbasis sekolah di MI Syariful Anwar Desa Poteran Kecamatan Talango dalam rangka menuju manajemen yang bermutu dan terpadu.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Berupa Pendahuluan Menjelaskan Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Serta Sistematika Pembahasan

BAB II Landasan Teori

Pertama, Mengenai Lembaga Pendidikan Islam atau Madrasah Ibtidaiyah yang berisi tentang pengertian lembaga pendidikan Islam, peran lembaga pendidikan Islam, bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam dan perkembangan lembaga pendidikan Islam.

Kedua, mengenai problematika penerapan manajemen berbasis sekolah, dan tentang pengertian MBS, tujuan MBS, strategi implementasi MBS, fungsi-fungsi MBS, MBS, Komponen MBS, dan Faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, obyek penelitian, sumber dan jenis data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisa data,

Bab IV Laporan hasil penelitian,

- a) Yaitu memaparkan data dari penelitian ini yang meliputi :gambaran umum lokasi penelitian dan keadaan yang ada didalamnya baik berupa sejarah singkat berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Syariful Anwar desa poteran-Talango, visi dan misi, sarana prasarana dan lain sebagainya.
- b) Penyajian dan analisis data; yaitu tentang problematika penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan. Faktor pendukung

dan penghambat penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Bab V Penutup

Bab terakhir ini berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran-saran